

**EFEKTIVITAS PASAL 4 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN  
2016 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERKOTAAN UNTUK MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012**

**(Studi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**IBNU MALIK JANI SAFARINA**

**NIM. 115010100111048**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PASAL 4 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN  
2016 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERKOTAAN UNTUK MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012  
(Studi di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)**

**OLEH :**

**IBNU MALIK JANI SAFARINA**

**115010100111048**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 196008101986011002

Agus Yulianto S.H., M.H.  
NIP: 195907171989032001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 196008101986011002

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si  
NIP. 1962080519288021001

## IDENTITAS TIM PENGUJI

1. Nama : Lutfi Effendi, S.H. M.Hum  
Nip : 196008101986011002  
Bagian : HAN  
Jabatan : Pembina /IV.A/ Lektor Kepala  
Alamat : Jl. Supriyadi IX /42B Malang  
Telp :082143134437
2. Nama : Agus Yuianto S.H. M.H  
Nip : 195907171986011001  
Bagian : HAN  
Jabatan : Penata Tk.I/ III.D/ Lektor  
Alamat : Perum Asabri Bumi Ayu Indah Blok G-8a Malang  
Telp : 081334722894
3. Nama : Herlin Wijayati, S.H. M.H  
Nip : 196010201986012001  
Bagian : HAN  
Jabatan : Penata Muda Tk.I/ III.B  
Alamat : Perum Griya Shanta A 115 Malang  
Telp : 08123309188
4. Nama : Istislam, Dr.S.H. M.Hum  
Nip : 196208231986011002  
Bagian : HAN  
Jabatan : Pembina/IV.A/ Lektor Kepala  
Alamat : Jl. Bunga Kopi 6 Malang  
Telp : 081233006307





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 474/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : IBNU MALIK JANI SAFARINA  
NIM : 115010100111048  
Judul : EFEKTIVITAS PASAL 4 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN  
2016 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERKOTAAN UNTUK MASA PAJAK SAMAPAI DENGAN TAHUN 2012  
(Studi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Mei 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**



Dr. Prja Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

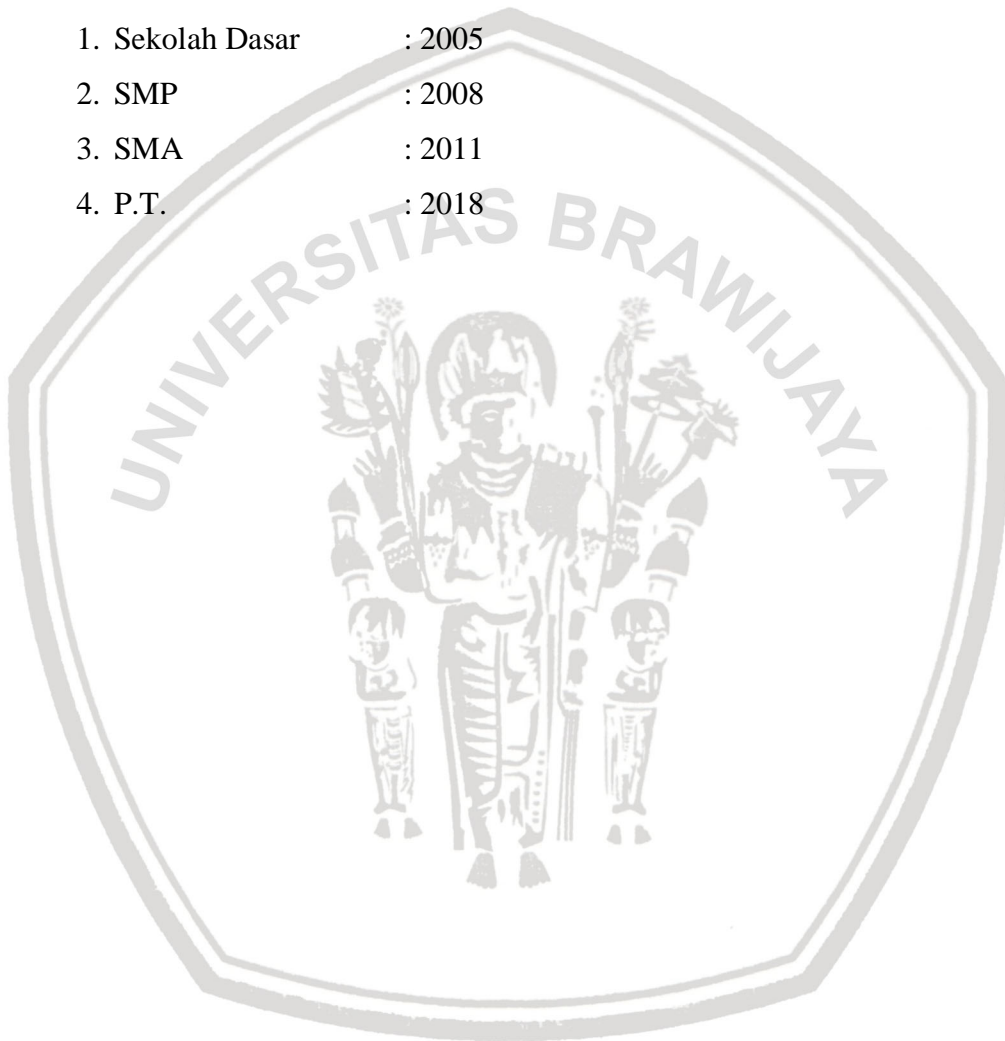
## Daftar Riwayat Hidup

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar : MI ISLAMIYAH Kota madiun
2. SMP : SMP Negeri 1 Madiun
3. SMA : SMA Negeri 5 Madiun
4. P.T. : Fakultas Hukum Univ. Brawijaya

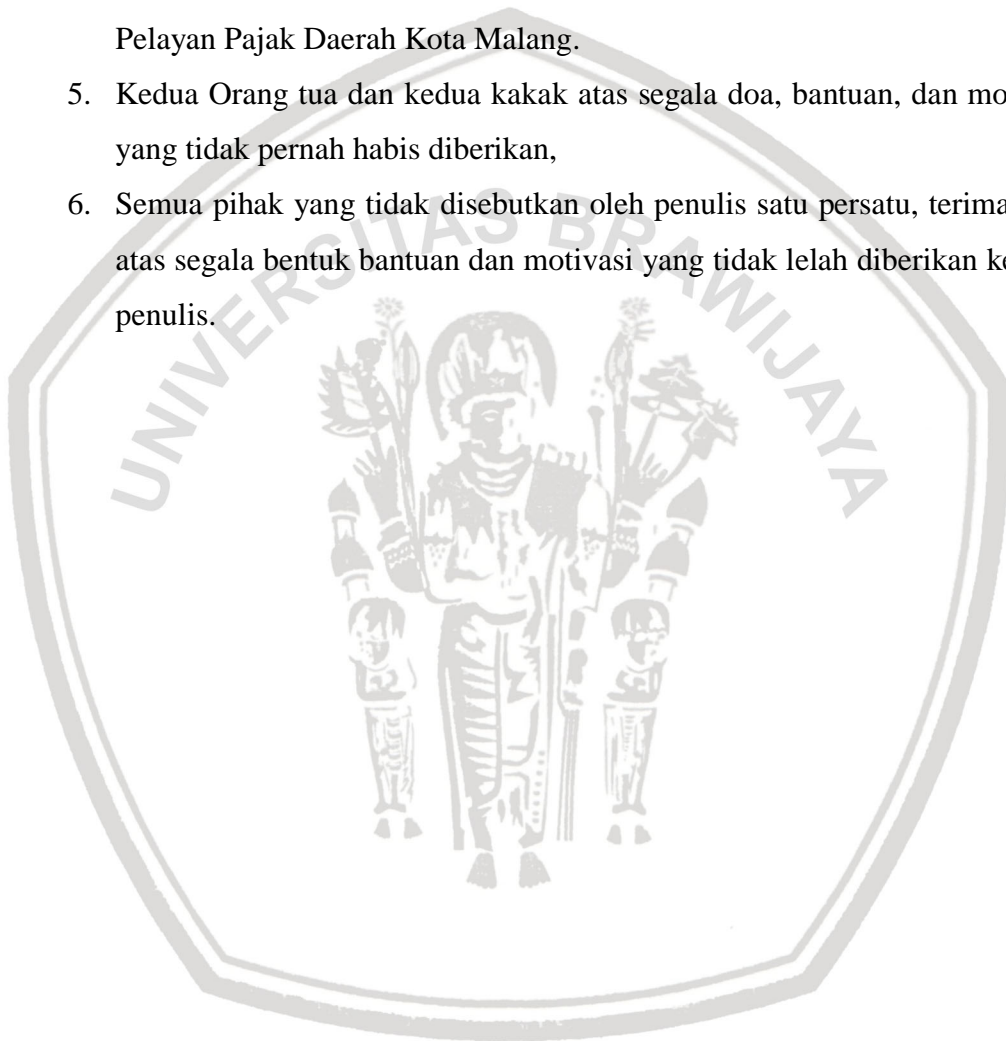
Tahun Lulus :

1. Sekolah Dasar : 2005
2. SMP : 2008
3. SMA : 2011
4. P.T. : 2018



## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Dosen pembimbing I.
3. Bapak Agus Yulianto, SH., M.H selaku Dosen pembimbing II.
4. Ibu Surya Bettasari, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Umum Badan Pelayan Pajak Daerah Kota Malang.
5. Kedua Orang tua dan kedua kakak atas segala doa, bantuan, dan motivasi yang tidak pernah habis diberikan,
6. Semua pihak yang tidak disebutkan oleh penulis satu persatu, terimakasih atas segala bentuk bantuan dan motivasi yang tidak lelah diberikan kepada penulis.





**EFEKTIVITAS PASAL 4 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN UNTUK MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 (Studi di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)**

Ibnu Malik Jani Safarina, Lutfi Effendi, Agus Yulianto

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email: [ibnumalikjani81@gmail.com](mailto:ibnumalikjani81@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (selanjutnya disebut Perda). Pasal tersebut menjelaskan mengenai sasaran atau subjek dari siapa saja yang mendapatkan penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas Perda melalui program sunset policy. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas Perda dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain yaitu Faktor Hukumnya, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan yang ada di dalam Perda dapat berlaku secara efektif melalui program sunset policy. Dalam hal ini faktor yang paling berpengaruh adalah faktor masyarakat dan faktor budaya. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan efektif tidaknya Perda sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak itu sendiri.

**Kata Kunci: Penerapan Peraturan Daerah, Efektivitas Hukum, Hukum Pajak, Kota Malang.**

***EFFECTIVENESS OF ARTICLES 4 OF MALANG CITY REGIONAL  
REGULATION NUMBER 7 YEAR 2016 ABOUT THE AMNESTY OF  
ADMINISTRATIVE SANCTIONS CAUSED BY LATE PAYMENT OF  
PROPERTY TAX AND URBAN BUILDINGS FOR TAXATION UNTIL 2012  
(Study at the Regional Tax Service Office of Malang City)***

Ibnu Malik Jani Safarina, Lutfi Effendi, Agus Yulianto

**Faculty of Law University of Brawijaya**

Email: [ibnumalikjani81@gmail.com](mailto:ibnumalikjani81@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study analyzes the implementation of Article 4 of Mayor of Malang City Regional Regulation No. 7 of 2016 about the amnesty of administrative sanctions caused by late payment of property tax and urban buildings for taxation until 2012. This article describes the target or subject of anyone who gets the abolition of administrative sanctions of late payment of land and building tax. Based on the statement above, the researcher is interested to do research on the effectiveness of the law through the sunset policy program. Through the use of empirical juridical research methods obtained the conclusion that the effectiveness of the law is influenced by various factors including the Legal Factors, Law Enforcement Factors, Supporting Factors or Facilities, Community Factors and Culture Factors. Based on the research that has been done, it can be concluded that the provisions in the local regulation can apply effectively through the sunset policy program. In this case the most influential factor is the factor of society and cultural factors. This can happen so because the effectiveness of local regulations is strongly influenced by the level of compliance as the taxpayers.*

**Keywords** : ***Implementation of Regional Regulation, Legal Effectiveness, Malang City.***



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul EFEKTIVITAS PASAL 4 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN UNTUK MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 (Studi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang) dengan baik dan lancar.

Penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulisan ini menyampaikan terima kasih kepada:

7. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
8. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmunya dan pengarahan yang telah diberikan selama penulisan penelitian ini,
9. Bapak Agus Yulianto, SH., M.H selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmunya dan pengarahan yang telah diberikan selama penulisan penelitian ini,
10. Ibu Surya Bettasari, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Umum Badan Pelayan Pajak Daerah Kota Malang atas bantuannya dalam menyelesaikan penelitian untuk memperoleh data yang digunakan oleh penulis,
11. Kedua Orang tua dan kedua kakak atas segala doa, bantuan, dan motivasi yang tidak pernah habis diberikan,
12. Semua pihak yang tidak disebutkan oleh penulis satu persatu, terimakasih atas segala bentuk bantuan dan motivasi yang tidak lelah diberikan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan anugerah dan barokah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Sebagai manusia

yang memiliki keterbatasan dan tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun,

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak serta menjadi sumber inspirasi untuk penulisan penelitian ini selanjutnya.

Malang, 18 Mei 2018

Penulis,

IBNU MALIK JANI SAFARINA

115010100111048



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak .....	11
B. Teori Tentang Efektifitas .....	14
C. Pengertian Pengaruh Hukum Terhadap Masyarakat .....	15
D. Teori Tentang Kaidah Hukum .....	17

E.	Teori Tentang Penetapan Efektifitas Dalam Hukum .....	18
F.	Pengertian Kebijakan Publik .....	21
G.	Pengertian Pelaksanaan Hukum.....	25
H.	Faktor – Faktor Penegak Hukum .....	27
I.	Pengertian Sanksi Administrasi .....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	36
B.	Pendekatan Penelitian .....	37
C.	Alasan Pemilihan Lokasi .....	37
D.	Jenis Data Dan Sumber Data .....	38
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
F.	Populasi dan Sampling .....	41
G.	Teknik Analisa Data .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	
1.	Struktur Organisasi BPPD Kota Malang Tahun 2017 .....	46
2.	Tugas Pokok Dan Fungsi .....	48
B.	Bagaimana Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang .....	51
1.	Faktor Hukum .....	53
2.	Faktor Penegak Hukum .....	55
3.	Faktor Sarana Atau Fasilitas .....	57
4.	Faktor Masyarakat .....	58
5.	Faktor Budaya .....	59
C.	Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dari pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016	



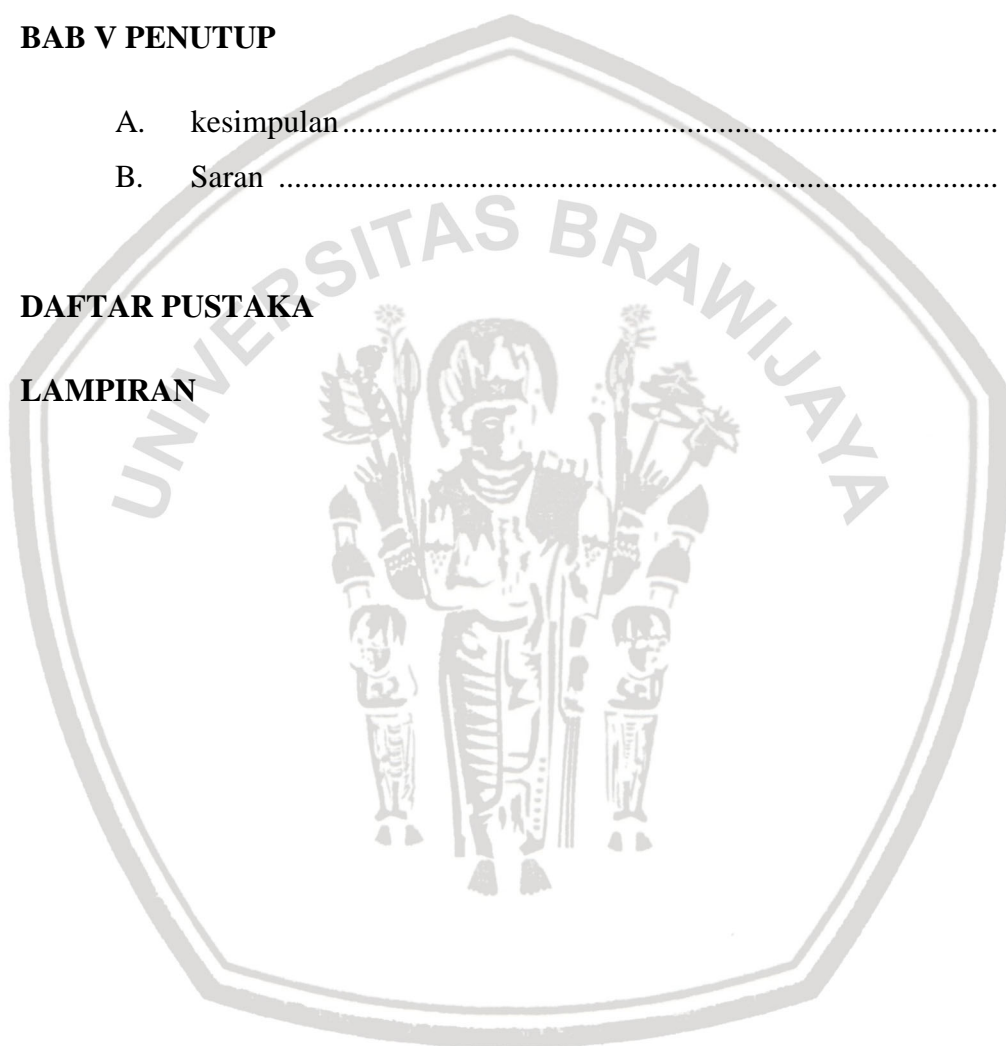
tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang	
.....	60
1. Hambatan .....	60
2. Solusi .....	61

## BAB V PENUTUP

A. kesimpulan .....	63
B. Saran .....	66

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1      Teori Hukum Menurut Friedman .....	20
Bagan 2      Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang .....	46



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Hasil pelaksanaan Program <i>Sunset Policy</i> Kota Malang Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	62
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari daerah propinsi, dimana dalam daerah propinsi dibagi menjadi daerah kota dan daerah kabupaten. Dalam pelaksanaannya masing-masing daerah memiliki wewenang, hak, dan kewajibannya sendiri, guna mewujudkan pelayanan yang efisien pada masyarakat. Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu perwujudan negara untuk daerah dalam menyelenggarakan wewenangnya yaitu perpajakan. Perpajakan dapat dikategorikan beban kepada rakyat di daerah atau lebih dikenal sebagai pemugutan pajak dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaannya pemungutan pajak dan retribusi daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu daerah di Indonesia yakni Kota Malang juga melaksanakan wewenangnya dalam hal pemungutan pajak.

Dengan adanya otonomi daerah, dalam pelaksanaannya pemerintah pusat mengalihkan sejumlah kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan tetap dibatasi oleh pemerintah pusat melalui suatu system kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan.<sup>1</sup> Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Implementasi otonomi daerah terhadap pemerintahan

---

<sup>1</sup>Yudoyono, Bambang, **Otonomi Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm 113



daerah yakni mengharuskan suatu daerah memiliki peran penting dalam mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak telah terjadi permasalahan yakni penunggakan pajak. Masalah mengenai penunggakan pajak bukan merupakan hal baru. Wajib pajak masih saja enggan untuk melakukan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Masalah ini membuat pemerintah bergerak untuk melakukan perbaikan diri, mulai dari peraturan undang – undang sampai dengan pelaksanaan di lapangan. Banyaknya wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak, membuat pemerintah memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak. Permasalahan yang timbul mengenai pajak yang dijelaskan penulis diatas merupakan permasalahan yang serius untuk itu pemerintah menetapkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016 terdapat dalam Pasal 1 angka 1, yakni:

“Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Penetapan Undang- Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak ini juga merupakan bentuk lebih lanjut dari Undang – Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan khususnya pasal 37A. Pengenalan *sunset policy* merupakan tujuan utama untuk menumbuhkan minat wajib pajak

untuk melakukan pembayaran pajak terutang yang dibebankan pada wajib pajak yang tidak mampu melakukan pembayaran PBB terutang dengan cara menghapuskan sanksi administrasi selama terhutangnya PBB itu. *Sunset Policy* diadakan di seluruh Indonesia dengan waktu yang di tentukan, tidak terkecuali di Kota Malang. Mengenai penghapusan sanksi administrasi untuk PBB ini, selanjutnya secara rinci telah dijelaskan dengan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 20 Tahun 2011 tentang PBB Perkotaan. Sasaran objek pajak dalam hal ini sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2011 tentang PBB Perkotaan yaitubumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subyek PBB perkotaan juga dengan jelas dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Daerah nomor 20 Tahun 2011 Tentang PBB perkotaan bahwa subjek pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah orang pribadi atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Pada Berita Acara Serah Terima Data Piutang PBB P2 dan Aset Sitaan dari KPP Malang Utara dan KPP Malang Selatan kepada Pemerintah Kota Malang (No: BA-11/WPJ.12/KP.01/2013 dan No: BA-7/WPJ12/KP-14/2013), Total piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lewat

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Malang mencapai sekitar Rp 110 miliar.<sup>2</sup> Piutang pajak ini terdata dari penunggak pajak dalam rentang masa pajak dari tahun 1994 hingga 2012.

Salah satu wujud ikut sertanya pemerintah kota Malang dalam program *tax amnesty* yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah kota Malang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012. Hal ini dilakukan pemerintah kota Malang untuk memberi keringanan pada wajib pajak yang memiliki tanggungan pajak dibawah tahun 2012 untuk melakukan pelunasan. Menurut Badan Pelayanan Pajak Daerah bahwa masih tingginya penunggak pajak Bumi dan Bangunan padahal BP2D telah melakukan pemberitahuan kepada penunggak pajak mulai dari pemberitahuan tertulis, pemberitahuan melalui media baik cetak maupun televisi atau radio. Hal ini dilakukan agar para penunggak mau membayar tunggakannya sebelum menjadi lebih besar. Selain itu juga *Sunset Policy* Kota Malang juga merupakan pengejawantahan misi besar Pemkot Malang yakni 'Peduli Wong Cilik'. Karena pada realitasnya banyak masyarakat kecil atau kalangan bawah yang menunggak PBB sejak tahun 90-an. Mereka kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Aflahul Abidin, Pitang PBB Lewat KKP Senilai Rp. 10 M, Dispenda Kota Malang Gelar Penghapusan Denda Agustus, 2016, <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/07/28/piutang-pbb-lewat-kkp-senilai-rp-110-m-dispenda-kota-malang-gelar-penghapusan-denda-agustus>, diakses pada tanggal 2 November 2017

<sup>3</sup> Rizky Wahyu Permana, Pekan Ini, Terakhir Pemutihan Denda PBB Perkotaan di Kota Malang, 2017, <https://malang.merdeka.com/kabar-malang/pekan-ini-terakhir-pemutihan-denda-pbb-perkotaan-di-kota-malang-1704112.html> diakses pada tanggal 5 November 2017

Sedangkan untuk wajib pajak yang menunggak pajak PBB untuk tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB dikarenakan menurut pemerintah wajib pajak masih sanggup dan mampu untuk membayarkan sanksi administrasi yang diberikan<sup>4</sup>. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari ketergantungan wajib pajak terhadap program penghapusan sanksi pajak seperti ini. Selain itu, program ini adalah tanggapan langsung oleh pemerintah Kota Malang atas Berita Acara Serah Terima (BAST) Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB P2 dan Aset Sitaan dari KPP Malang Utara dan KPP Malang Selatan kepada Pemerintah Kota Malang (No: BA-11/WPJ.12/KP.01/2013 dan No: BA-7/WPJ12/KP-14/2013) tanggal 30 januari 2013 dan sesuai amanat pasal 24 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Memperhatikan nilai piutang yang tertuang dalam BAST terhitung sejak tahun 1994 sampai 2012 merupakan salah satu asset pemerintah yang perlu diperhatikan guna meningkatkan pertumbuhan kota Malang. Kebijakan *sunset policy* ini merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah kota Malang untuk menyikapi atas piutang pajak PBB perkotaan yang cukup besar dengan jumlah lebih dari Rp. 110 Milyar. Pemerintah Kota Malang melalui BP2D telah memberikan pelayanan terbaik terkait *Sunset Policy* di Kota Malang ini agar pembayaran tunggakan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang dapat berjalan dengan baik dan sesuai menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Dwi Cahyo, S.sos., MM.selaku Ketua Bidang Penagihan dan pemeriksaan Dinas Pelayanan Pajak Daerah, pada tanggal 5 Januari 2018 di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.



2016. Pasal 4 (empat) Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 berisi mengenai :

“Sasaran penghapusan sanksi administrasi merupakan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan PBB Perkotaan masa pajak sampai dengan tahun 2012.

Dalam hal ini penulis berpikiran mengenai efektif atau tidaknya subjek dalam penghapusan sanksi administrasi pada penunggak pajak bumi dan bangunan perkotaan yang ada di Malang sampai dengan tahun 2012.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas , maka penulis tertarik mengangkat ke dalam penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS PASAL 4 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN UNTUK MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 (STUDI DI KANTOR DINAS PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG)**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang?
2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dari pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan mencari upaya dari permasalahan serta hambatan dari pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran

pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan hukum, khususnya berkaitan dengan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota Malang.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah Kota Malang**

Penelitian ini dapat digunakan pemerintah sebagai referensi bagaimana Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang.

###### **b. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa yang meneliti masalah yang sama di waktu yang akan datang, serta dapat mengembangkan dan memperbaiki segala kekurangan dari penelitian ini.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam mempelajari proposal ini, maka dalam bagian ini akan diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan dalam :

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I dalam penulisan skripsi ini, adalah berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari adanya penelitian dan manfaat penelitian ini kedepannya.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab II ini berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang mengkaji, membahas dan memuat argumentasi ilmiah, teori atau doktrin mengenai tinjauan umum tentang ketertiban umum, tinjauan umum tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab III ini berisi mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional.



#### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Bab IV dalam penulisan skripsi ini berisi pembahasan terhadap fokus kajian skripsi ini yang antara lain membahas dua permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang serta hambatan dan upaya yang dilakukan dari pelaksanaan Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dua permasalahan yang terdapat dalam Bab IV yang bertujuan untuk mengetahui secara singkat hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, yakni :

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.”<sup>1</sup>

Dari pengertian diatas, terdapat pula pengertian – pengertian dari pajak menurut para ahli, diantaranya :

1. Prof. PJA Andriani

Pajak merupakan suatu iuran masyarakat untuk negara yang bersifat memaksa bagi wajib membayar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, tidak mendapatkan prestasi kembali, yang bertujuan untuk pembiayaan pengeluaran umum negara dalam menyelenggarakan tugas negara.<sup>2</sup>

2. Prof. Dr. Smeets

---

<sup>1</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, **Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm 4.

<sup>2</sup> PJA. Adriana dalam Santoso Brotodiharjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, PT. Eresco, Bandung, 1991, hlm2.

Pajak adalah suatu prestasi bagi terutang kepada negara yang bersifat memaksa melalui norma – norma umum, yang berguna untuk pembiayaan akan tugas negara yang diselenggarakan untuk kepentingan umum.<sup>3</sup>

Dari pengertian – pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan pajak merupakan suatu iuran yang diperuntukkan bagi terutang kepada negara, yang bersifat memaksa dan berguna untuk pembiayaan tugas negara. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelal 11 dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari beberapa pajak yakni, diantaranya :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. penerimaan cukai
7. pencairan tunggakan pajak
8. maupun pajak-pajak lainnya.


Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) adalah salah satu direktorat jenderal yang dinaungi Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar terdapat di Jakarta. Sementara di Jawa timur sendiri terdapat 3 (tiga) Kantor wilayah yakni Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur 1 di Surabaya, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur 2 di Sidoarjo, dan Kantor Wilayah

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 4.

Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur 3 di malang. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur 3 terletak di Jalan Letjend S. Parman No. 100, Malang, 65122.

Tugas dari Direktorat Jendral Pajak adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundangan- perundangan, yang terdiri dari :<sup>4</sup>

- 
1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
  6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.



Direktorat Jendral Pajak terdiri dari kantor pusat dan unit kantor operasional dengan wewenang masing- masing yakni:

1. Unit Kantor Pusat, terdiri dari :

---

<sup>4</sup>Direktorat Jendral Pajak, 2012, **Selayang Pandang**, <http://www.pajak.go.id/content/selayang-pandang>, (22 Januari 2017).

- a. Sekretariat Direktorat Jendral
- b. Direktorat
- c. Jabatan Tenaga Pengkaji

2. Unit Kantor Operasional :

- a. Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP)
- b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- c. Kantor Pelayanan
- d. Penyuluhan
- e. Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
- f. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP)
- g. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP)

**B. Teori Tentang Efektifitas**

Mengenai efektifitas hukum tidak terlepas dari mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Jika suatu aturan hukum tersebut ditaati, maka bisa dikatakan bahwa hukum tersebut telah efektif. Namun tetap dipertanyakan lebih jauh mengenai derajat keefektifitasannya. Sehingga berbicara mengenai efektif atau tidaknya hukum tersebut dapat dilihat dari besarnya masyarakat yang mentaati hukum tersebut dan tergantung dari kepentingannya sendiri. Jika masyarakat mentaati hukum karena kepentingan *Compliance* (taat karena sanksi), dan atau *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), maka dapat dikatakan bahwa derajat ketaatannya sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa suatu aturan hukum tersebut tidak efektif dimata masyarakat.

Ada dua hal yang dapat dikaji dalam efektifitas hukum :

1. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;



2. Bagaimana ketaatan terhadap suatu peraturan tertentu dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas hukum dan perundang-undangan adalah professional dan optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka maupun dalam menegakkan hukum dan undang-undang. Bekerjanya undang-undang dapat dilihat dari dua perspektif, anantara lain :

- a. Perspektif Organisatoris yang memandang undang-undang sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Didalam perspektif ini tidak terlalu memperhatikan pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.
- b. Perspektif Individu Ketaatan yang lebih berfokus pada segi individu atau pribadi dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Fokus perspektif Individu adalah kepada masyarakat sebagai kumpulan pribadi - pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan orang taat atau tidak taat terhadap undang-undang, dengan kata lain pola-pola perilaku masyarakat yang banyak mempengaruhi efektifitas perundang-undangan.<sup>5</sup>

### C. Pengertian Tentang Pengaruh Hukum Terhadap Masyarakat

Banyak pakar dan ahli yang mengemukakan pendapat mengenai hubungan timbal balik antar hukum dengan masyarakat. Apabila yang dikemukakan adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, maka pembicaraan tersebut biasanya diberi judul "*social engineering*" atau hukum sebagai sarana untuk mengatur masyarakat serta

---

<sup>5</sup>Mulyana Kusumah, 1986. **Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum**, Jakarta Rajawali Hlm 27

menciptakan atau membentuk unsur-unsur baru yang membimbing masyarakat ke suatu arah tertentu.<sup>6</sup>

Maksud inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum. Secara konseptual memang seperti itu, tetapi dalam faktanya hukum tidak selalu berpengaruh secara terhadap masyarakat. Artinya tidak mustahil bahwa hukum justru mengakibatkan terjadinya penilaian yang menyimpang, oleh karena itu warga masyarakat berbuat melawan hukum, ada kalanya bahwa masyarakat yang tidak mengacuhkan hukum dapat dimungkinkan. Hal tersebut bisa timbul dikarenakan peraturan yang sama sekali tidak ditegakkan atau mungkin peraturan tersebut tidak diperdulikan sama sekali. Hal ini juga dapat disebabkan karena ancaman hukum yang kurang berat, sehingga warga masyarakat sama sekali tidak memperdulikan hukum tersebut.

Hukum bukan lagi dianggap sebagai gejala yang melindungi masyarakat, akan tetapi dianggap sebagai penyebab terjadinya ketidakadilan. Hal-hal semacam itu tidak mustahil, mengakibatkan orang-orang tertentu melawan hukum, sehingga perilakunya sama sekali bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri di dalam hubungan antar individu. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah hukum kurang berhasil di dalam fungsi sebagai sarana untuk mengadakan “*social engineering*” di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

#### D. Teori Tentang Kaidah Hukum

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekamto, 1983, **Beberapa Aspek Sosiologi Yuridis Masyarakat**, Bandung, Alumni, Hlm : 87

<sup>7</sup>Ibid hlm 89-90

Dalam ilmu hukum dibedakan antara tiga macam berlakunya hukum sebagai kaidah. Tentang hal berlakunya kaidah hukum ada anggapan sebagai berikut :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya hal ini di jelaskan pada teori “ stufenbaa” oleh Hans kalsen. Dalam hal ini perlu diperhatikan, apa yang dimaksud dengan efektifitas hukum yang dibedakannya dengan hal berlakunya hukum, oleh karena efektifitas merupakan fakta atau kaidah hukum mempunyai juga kelakuan yuridis bila kelakuan tersebut “op devereishote wijze is tos stand gekomen”, yaitu terbentuk menurut cara yang telah di tetapkan atau apabila suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaidah hukum secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima warga masyarakat ( teori kekuasaan atau the power theory ) kalau kaidah tidak berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat ( teori pengakuan atau recognitiontheory ) .
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofi, artinya artinya sesuai dengan cita – cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Pembentukan hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai filosofi, sosiologis dan yuridis, tetapi juga harus memperhatikan suatu spek yuridis yang baik yang dapat berpengaruh terhadap efektifitas hukum yang baik. Dalam hal ini Bagir Manan menyatakan:

Kenyataan tidak selalu demikian, peraturan perundang – undangan yang kurang baik juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya sehingga dapat bersifat ambigu. Masalah ketidakjelasan menimbulkan

interpretasi. Hal tersebut tidak boleh dihiraukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sehingga terciptanya kualitas peraturan yang tertib dan teratur.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Keterlibatan dan ketentraman hanya dapat terwujud dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan dengan tertib. Dalam penegakan tersebut jika dalam struktur, substansi dan budaya harus berjalan dan menciptakan ketertiban hukum yang berkeadilan.

#### **E. Teori Tentang Penerapan Efektifitas Dalam Hukum**

Efektifitas hukum mempunyai hubungan yang erat dengan usaha yang dilakukan yaitu hukum yang benar-benar dilakukan dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara sosiologis. Guna mewujudkannya hukum tersebut sangat tergantung pada usaha dalam menanamkan ketentuan hukum itu sendiri. Penegakan hukum itu tidak akan terjadi apabila tidak terdapat keseimbangan antara struktur, kultur, dan substansi terkait.

Tindakan hukum biasanya mempunyai pengaruh tertentu apabila berkaitan dengan dengan tingkah laku dengan pihak lain yang berkepentingan. Suatu tujuan dapat terwujud dan efektif apabila telah sesuai dengan yang diinginkan dengan tercapainya tujuan tersebut. Adanya toleransi sosial terhadap penyimpangan hukum, antisipasi terhadap penegakan hukum dan kekebalan institusional pada dasarnya dapat menyebabkan berkurangnya efektifitas pemberlakuan suatu peraturan.

Hans Kelsen mengajukan teori melalui efektifitas hukum yang disebut “principle of effectiveness” yang menyatakan orang harus berperilaku harus menurut kaidah hukum. Apabila seseorang itu menilai berhasil apa tidak hukum berlaku efektif

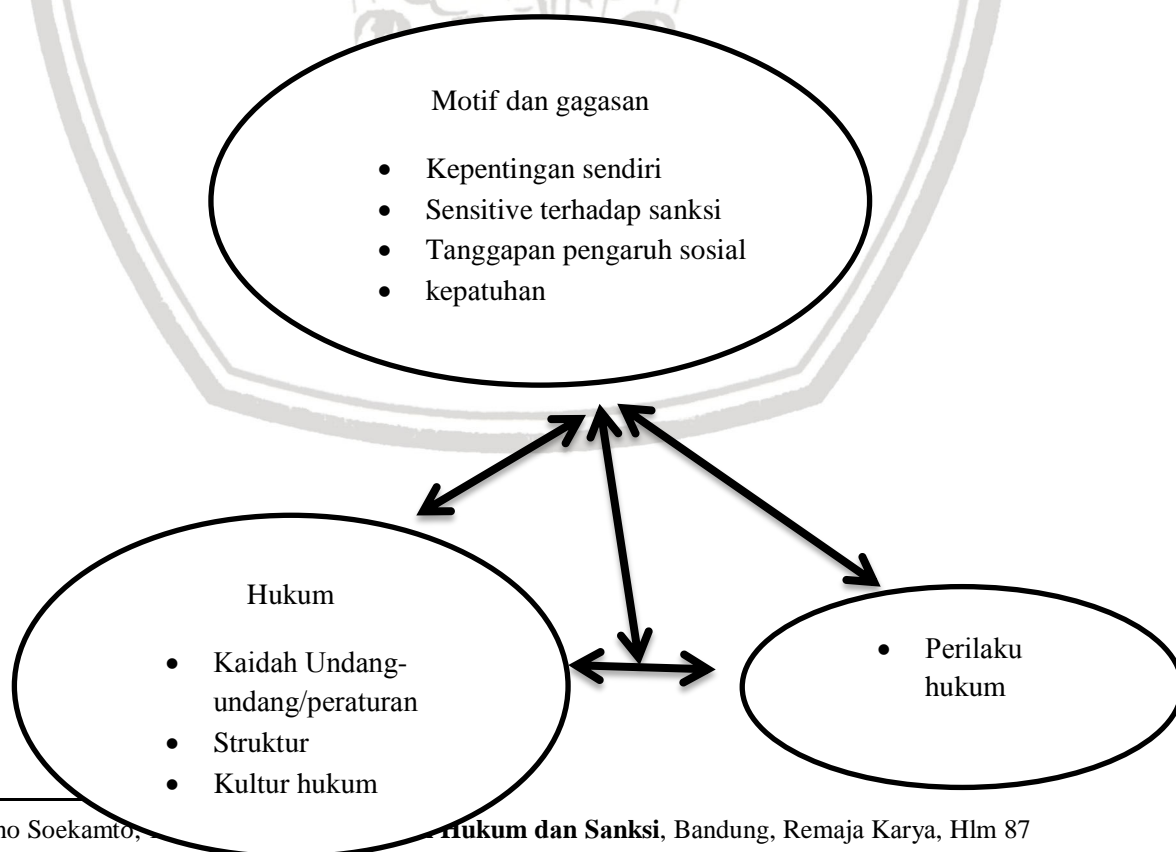
sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, maka hal tersebut bisa diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tidak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak.<sup>8</sup>

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa efektifitas hukum dipengaruhi perilaku warga masyarakat dalam mewujudkan hukum secara nyata sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Dengan kata lain, efektif atau tidaknya hukum terletak pada keberhasilan dalam mewujudkan hukum di masyarakat sebagai sebuah perilaku yang sesuai dengan hukum.

Perilaku hukum adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan atau keputusan. Perilaku hukum yang menyangkut soal pilihan yang berurusan dengan orang meliputi kepentingan sendiri, sensitive terhadap sanksi.

### BAGAN I

#### Tentang : Teori Hukum Menurut Friedman



<sup>8</sup>Soerjono Soekamto,



Berdasarkan paradigma Friedman ini, efektifitas hukum tergantung pada motif dan gagasan seseorang yang terwujud dalam perilaku yang sesuai bahkan tidak sesuai dengan hukum. Ketidaksesuaian antara perilaku masyarakat dengan kaidah hukum. Tidak sesuai antara perilaku masyarakat dengan kaidah hukum yang telah ditetapkan menunjukkan ketidakefektifan hukum dalam kehidupan yang tertib akan hukum.

Tidak semua lapisan masyarakat bisa mentaati dan mematuhi hukum positif yang tertulis, terdapat juga beberapa faktor penyebab yang digunakan agar masyarakat dapat menjalankan kaidah hukum. Dalam uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa tindakan seseorang didalam masyarakat tidak dipengaruhi oleh faktor objektif yang ada pada dirinya sendiri, akan tetapi dipengaruhi juga oleh kondisi eksternal yang mengharuskan seseorang berbuat menyesuaikan dengan keadaan tertentu. Pendapat umum yang berkembang di masyarakat, ternyata juga dapat mempengaruhi sebuah keputusan seseorang dalam melaksanakan hukum. Hal ini diungkapkan oleh Satjipto Raharjo yakni sebagai berikut :

Betapa pentingnya sesungguhnya peranan pada pengorganisasian pendapat umum untuk menjamin tercerminnya pendapat umum itu secara seksama hanya pendapat umum yang mampu diutarakan dengan baik saja yang bisa menjamin, bahwa ia akan memberikan pengaruh dalam kehidupan hukum. Oleh karena itu apabila pendapat umum itu dapat benar-benar diinginkan untuk tercermin dalam hukum, seperti dalam undang-undang misalnya, maka prosesnya harus diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga memberikan jaminan kearah itu dan tidak hanya mencerminkan pendapat satu orang atau kelompok kecil.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Satjipto Raharjo, 2002, **Ilmu Hukum**, Bandung, Citra Aditya Karya Bakti, Hlm 157

Kekuatan sosial saja yang murni masih susah dijadikan landasan seseorang untuk dapat melaksanakan hukum yang didasarkan untuk kepentingan individu. Untuk dapat mempunyai arti yang benar dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendapatkan ketetapan hukum.

#### **F. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan saat ini masih banyak berorientasi pada nasihat dan rancangan para pakar dan kaum elit tanpa melibatkan masyarakat dalam suatu debat dan musyawarah publik. Pola kebijakan seperti ini masih dianggap sebagai kebijakan tradisional dan cenderung mengarah pada tindakan yang otoriter dan belum tercerahkan semangat musyawarah (*deliberation*) untuk mencapai mufakat (*consensus*) dalam demokrasi yang sebenarnya. Kebijakan pada dasarnya menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. Kebijakan membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (*constructed*), didefinisikan, serta bagaimana semua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan.

Menurut Hasibuan mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan-pernyataan atau pengertian-pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan yang fungsinya adalah menandai lingkungan sekitar yang dibuat sehingga memberikan jaminan bahwa keputusan-keputusan itu akan sesuai dengan tercapainya tujuan.<sup>10</sup> Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Islami definisi tentang kebijakan (*policy*) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi modern kebijakan Negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para

---

<sup>10</sup> Malayu, Hasibun. Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPN. Yogyakarta. 2000. Hal. 99

pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan Negara, misalnya kebijakan Negara yang menaruh harapan banyak agar pelaku kejahatan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dari sisi lain sebagai abdi masyarakat haruslah memperhatikan kepentingan publik.<sup>11</sup>

Menurut Wahab Kebijakan negara adalah suatu arah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian di atas bahwa kebijaksanaan merupakan suatu pedoman yang menyeluruh guna mencegah terjadinya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Kebijakan juga merupakan suatu rencana yang mengarah pada daya pikir dari pengambilan keputusan kearah tujuan yang diinginkan. Kebijakan mungkin terjadi dan berasal dari seperangkat keputusan yang tampaknya tetap untuk hal-hal yang sama.

Kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.<sup>13</sup> Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.) yang mengungkapkan bahwa masalah publik dapat dibedakan

---

<sup>11</sup> Irfan Islamy, **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 10

<sup>12</sup> Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm 3.

<sup>13</sup> Koryati Nyimas Dwi. DKK, **Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah**, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004, hlm. 10.

kedalam masalah prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah di organisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya.

Dengan melihat definisi tersebut, maka pemahaman mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi dua pembagian. Pembagian jenis kebijakan publik yang pertama adalah makna dari kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.

Kebijakan Publik tidak lahir begitu saja, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang, yang membedakannya dalam lima langkah proses kebijakan, yaitu<sup>14</sup>

1. *agenda setting,*
2. *policy formulation,*
3. *policy adaption,*
4. *policy Implementation,*
5. *policy assessmen/evaluation.*

Sementara Riplay membedakannya dalam empat tahapan, yaitu:

1. *agenda setting,*
2. *formulation and legitimating of goals and programs,*
3. *program implementation, performance,*
4. *impact, and program.*

Menurut Nugroho R Kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus

---

<sup>14</sup> Widodo Joko, **Membangun Boirokrasi Berbasis Kinerja**, Bayumedia Publishing, 2005, hlm 10.

ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.<sup>15</sup>

### G. Pengertian Pelaksanaan Hukum

Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu, hukum harus terlaksana dengan sebaik-baiknya agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi pada kenyataannya, pelanggaran-pelanggaran hukum masih kerap dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum agar tujuan hukum dapat tercapai. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan agar penegakan hukum ini bisa menjadi kenyataan dan bukan sekedar wacana saja. Sesuai dengan bagaimana bunyi hukumnya, maka itulah yang harus berlaku; fiat justitia et pereat mundus ( meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan ). Itulah yang disebut dengan kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan bisa mencapai tujuan dari masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, jika hukum itu tidak ditegakkan, maka masyarakat tidak akan bisa merasakan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum dan tujuan dari masyarakat tidak akan bisa tercapai. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum l 11 adil. Dalam kehidupan bermasyarakat

---

<sup>15</sup> Abidin Said Zainal, **Kebijakan Publik**, Penerbit Pancur Siwah, Jakarta, 2004, Hlm, 15.



diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat serta tatanan sosial yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat belum mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga hal ini dapat menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara ada kalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. Pelaksanaan hukum agar berjalan efektif tentu membutuhkan faktor-faktor yang mendukung dalam tahap pelaksanaannya. Soerjono soekanto menyebutkan beberapa faktor tersebut antara lain :<sup>16</sup>

1. Faktor hukum dari hukum itu sendiri,
2. Faktor dari penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau pihak yang menerapkan hukum tersebut,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum tersebut,
4. Faktor dari masyarakat yaitu lingkungan dimana suatu hukum diberlakukan dan dijalankan,
5. Faktor kebudayaan atau culture.

Dari beberapa faktor tersebut saling berhubungan karena berkaitan dan saling melengkapi, karena merupakan makna dari penegakan hukum, dan juga sebagai tolak ukur seberapa hukum tersebut dapat diterapkan. Pada bagian pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum ini dengan baik atau tidak adalah dari aturan hukum itu sendiri. Salah satu kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan hukum adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum secara teratur. Penyuluhan hukum tersebut terutama

---

<sup>16</sup> Soerjono soekanto, **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perbuatan Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 8

bertujuan, agar warga masyarakat memahami hukum yang menjadi salah satu pedoman bagi pergaulan hidup yang damai.<sup>17</sup>

## H. Faktor-Faktor Penegak Hukum

Pada perinsipnya ada dua macam penegakan hukum yaitu penegakan hukum private dan penegakan hukum publik. Penegakan hukum private disediakan untuk mendapatkan remedy karena pelanggaran ketentuan yang melanggar ketentuan yang mengatur hubungan antara individu atau perdata yang biasanya mengakibatkan kerugian pada individu.

Sedangkan penegakan hukum publik merupakan kondisi dimana individu tidak dapat langsung berhubungan dengan pengadilan dalam upaya menegakan hukum. Akan tetapi harus melalui lembaga yang di tunjuk oleh undang-undang yang dalam hal ini diberikan wewenang dalam hal yang berhubungan dengan masalah terkait. Dalam hal ini lembaga yang di tunjuk bertanggung jawab dan mempunyai wewenang penuh.

Proses penegakan hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang cultural penegakan hukum adalah upaya yang dilaksanakan untuk melaksanakan internalisasi hukum pada masyarakat. Dari sudut pandang striktual, proses penegakan hukum adalah bekerjanya lembaga untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai dengan ideologi hukum.<sup>18</sup>

Sementara pencegahan itu sendiri adalah pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai implementasi dari hukum yang telah dibuat.

---

<sup>17</sup> Soerjono soekanto, **Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah sosial**, Alumni, Bandung, 1982, hlm 119

<sup>18</sup> Mulyana Kusumah, 1986, **Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan hukum**, Jakarta, Rajawali, Hlm 59

Hal ini berbeda lagi dengan pengertian menurut Muktie Fadja ( guru besar Universitas Brawijaya ) bahwa penegakan hukum adalah seluruh kegiatan hukum yang berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum agar hukum tidak kehilangan makna dan fungsi segalanya hukum, baik perorangan pribadi maupun seluruh masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektifitas hukum menurut prof Soerjono Soekanto terdapat empat unsur efektifitas yaitu <sup>19</sup>:

1. Subtansi hukum dan kaidah hukum (undang-undang)

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Asas – asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut artinya undang-undang hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan dinyatakan berlaku dalam undang-undang tersebut .
- b. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap dalam peristiwa yang khusus diwajibkan diberlakukannya undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut, walaupun dalam peristiwa khusus dapat pula diberlakukan undang-undang

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1983, **Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**, Jakarta, UI press, Hlm 61

yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas. Yang juga dapat mencakup peristiwa tersebut.

d. Undang-undang yang berlaku terdahulu artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana di atur pada suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang mengatur hal tertentu tersebut.

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

## 2. Stuktur Hukum atau Aparat Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan didalam bidang hukum. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai kedudukan dan peran yang sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil timbul konflik dari beberapa kedudukan.

## 3. Kultur Hukum atau Budaya Hukum Masyarakat

Kebudayaan di masyarakat merupakan yang mendasari nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan dijadikan suatu kebiasaan.

Penilaian atas efektifitas hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penerapan hukum dalam kurun waktu tertentu yang sudah mendekatkan kepada tujuan hukum yakni keadilan dan seberapa jauh nilai-nilai hukum prosedural maupun nilai-nilai hukum substansif telah terimplementasi melalui penegakan hukum.<sup>20</sup> Menurut Selo Soemarjan, efektifitas hukum berkaitan erat dengan hal sebagai berikut <sup>21</sup>:

<sup>20</sup> Mulyana Kusumah, op cit, Hlm 60

<sup>21</sup> Selo Soemarjan, dalam Abdul Mukti Fadjar, 1997, **Hukum dan Penataan Politik di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hlm 12

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, dan menaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasari pada sistem nilai yang berlaku, artinya masyarakat akan menolak dan menentang atau mematuhi hukum karena kepentingan mereka terjamin sepenuhnya.
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha penanaman hukum itu diharapkan mempunyai hasil.

Sedangkan Howard dan Mammers mengungkapkan syarat-syarat bagi efektifitas suatu undang-undang sebagai berikut<sup>22</sup> :

1. Undang-undang dirancang dengan baik.
2. Undang-undang tersebut bersifat melarang bukan mengharuskan.
3. Sanksinya sepadan dengan sifat undang-undang yang bersakutan.
4. Berat sanksinya tidak berlebihan.

## **I. Pengertian Sanksi Administrasi**

### **1. Bentuk Jenis-Jenis Sanksi Administrasi<sup>23</sup>**

Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. tenBerge, “sanksi merupakan inti dari pelaksanaan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin pelaksanaan hukum administrasi”. Menurut P de Haan dkk ”dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis” . JJ. Oosternbrink berpendapat “sanksi administrasiinistratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah–warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga

<sup>22</sup> Howard dan Mammers, Dalam Abdul Mukti Fadjar, 1997, **Hukum dan penataan Politik di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hlm 11

<sup>23</sup> Ridwan HR, **Hukum Adaministrasi Negara**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 54-62



(kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri”. Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*),
- b. sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang misalnya adalah berupa denda administratif,
- c. sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan, Perbedaan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana adalah, jika Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat *reparatoir-condemnatoir*, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan .Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku, sifat *condemnatoir*, harus melalui proses peradilan.

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

## 2. Paksaan Pemerintahan (*Bestuursdwang*)

Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah

Tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya. *Bestuursdwang* merupakan Kewenangan Bebas, artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya. Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan Hukum yang berlaku baik Hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain-lain.

### 3. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan

Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di dalam HAN terdapat asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yaitu bahwa pada dasarnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum. Oleh karena itu, Ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim di pengadilan. Kaidah HAN memberikan kemungkinan untuk mencabut Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima Ketetapan Tata Usaha Negara sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya. Sebab-sebab Pencabutan Ketetapan

Tata Usaha Negara sebagai Sanksi ini terjadi melingkupi jika, yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasanpembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. Jika yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan berlainan misalnya penolakan izin.

#### 4. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)

Menurut pendapat N.E. Algra, tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan

#### 5. Pengenaan Denda Administratif

Menurut pendapat P de Haan DKK menyatakan bahwa, terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman

yang pasti. Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris dipilih karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan akhir untuk menemukan serta mencari penyelesaian masalah (*problem-solution*) di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini diawali dengan proses penemuan fakta-fakta (*fact-finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan proses penemuan masalah (*problem-finding*).<sup>1</sup> Yang mana dalam penelitian ini tentang Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.



sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan ilmu hukum yang dilakukan melalui penelitian di lapangan. Yuridis sosiologis dalam penelitian ini yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan tertentu seperti lembaga, organisasi atau perusahaan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan analisis secara langsung terkait Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang. Penelitian ini menekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada perundang-undangan yang ada<sup>2</sup>.

## **C. Alasan Pemilihan Lokasi**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang yang berlokasi di Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, Jl. Mayjend Sungkono, Arjowinangun,

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 10

Kedungkandang, Malang, Jawa Timur 65132, Indonesia. Lokasi penelitian DI Kota Malang dipilih karena Kota Malang memiliki Pajak Piutang Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp. 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar. Hal ini dibuktikan pada saat Berita Acara Serah Terima Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 dan Aset Sitaan dari KPP Malang Utara dan KPP Malang Selatan Kepada Pemerintah Kota Malang. Pemilihan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sebagai lokasi penelitian dikarenakan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang merupakan instansi yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan pajak di Kota Malang.

#### **D. Jenis data dan sumber data**

Jenis data yang digunakan adalah :

##### **1. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara<sup>3</sup>. Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan atau langsung dari sumbernya dengan melakukan studi lapang terhadap objek di lapangan tentang Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang. Dalam hal ini peneliti melalui interview atau wawancara langsung dengan responden untuk mengetahui penghapusan sanksi

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm.12

administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota Malang.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari kepustakaan meliputi literature/buku-buku yang terkait dengan penelitian, dan dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, dokumen-dokumen resmi, penelitian, surat kabar, jurnal dan internet<sup>4</sup>. Dimana data tersebut terkait dengan Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang. Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- c. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- d. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- e. Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 141

bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang.

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan lokasi penelitian yaitu di Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Kota Malang.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan serta menganalisis kepustakaan meliputi literatur/buku-buku yang terkait dengan penelitian, dan dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, dokumen-dokumen resmi, penelitian, surat kabar, jurnal dan internet dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat dalam pusat informasi hukum atau perpustakaan instansi yang terkait dan penelusuran melalui internet. Diantaranya :

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh peneliti berupa wawancara langsung dari lokasi penelitian dengan responden terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang

## **2. Data Sekunder**

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Efektivitas penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang.

## **F. Populasi dan Sampling**

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek atau seluruh individu atau seluruh gejala, seluruh kejadian dan seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh staff Dinas Pelayanan Pajak Daerah.

### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Sampel yang ditentukan peneliti berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu sampling yang ditentukan dulu oleh peneliti karena peneliti telah menetapkan lokasi penelitian lebih dahulu.



Hal yang menjadi sampel peneliti adalah beberapa orang atau pengurus yang memiliki informasi lengkap terkait Efektivitas penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang

#### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yuridis kualitatif yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan<sup>5</sup>. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya yang selanjutnya peneliti melakukan uraian dan penafsiran yang didasarkan pada aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang valid berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum mewakili wawancara dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dengan cara menyatukan bahan hukum dan menganalisa kemudian menguraikan secara cermat hasil dari bahan hukum yang diperoleh.

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal H., **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 28.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 112

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan suatu pungutan yang dibayar oleh rakyat kepada Negara yang bertujuan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan bersama. Dalam aspeknya pajak akan dirasakan tidak secara langsung oleh para pembayar pajak karena pajak mempunyai sifat untuk kepentingan umum. Kita dapat merasakan secara langsung jika kita melihat dari aspek pelengkapan sarana dan prasarana kepentingan umum. dalam hal pemunggutan Negara berhak untuk memaksa warga negaranya untuk membayar karena telah diatur dalam Undang-Undang. Di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang khusus untuk menjalankan pelaksanaan kebijakan pajak yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lembaga ini dikenal sebagai lembaga yang dinaungi oleh Kementrian Keuangan yang memiliki ruang lingkup di bidang perpajakan. Direktorat Jendral Pajak terdiri dari kantor pusat dan unit kantor operasional , dimana kantor pusat terdiri dari Sekretariat Direktoral Jendral,Direktorat, dan Jabatan Tenaga Pengkaji, sedangkan Unit Kantor Operasional terdiri dari Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Kantor Penyuluhan, konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP). Direktorat Jenderal Pajak memiliki Kantor wilayah yang terdapat di Ibukota Jakarta, di Jawa timur sendiri terdapat 3 (tiga) kntor wilayah yakni Kantor Wilayah Direktorat Jendral

Pajak Jawa Timur 1 di Surabaya, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur 2 di Sidoarjo, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur 3 di Malang. Tetapi mengenai pajak pemerintah daerah juga ikut andil yakni dengan adanya Dinas Pelayanan Pajak daerah yang melayani pembayaran pajak bagi masyarakat daerah. Dalam penelitian ini penulis memilih tempat penelitian di Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

#### **A. Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang**

Dalam penelitian mengenai penerapan pasal 4 ini penulis mengambil penelitian di Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang dikelola oleh Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan suatu pendapat daerah yang maksimal demi dan untuk kepentingan masyarakat Kota Malang. Berikut struktur organisasi dari Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Dinas Pelayanan Pajak Daerah berasal dari Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970 yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan, tugas, serta menyesuaikan kebutuhan karena terjadi peningkatan volume dan jenis pekerjaan. Menurut Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970 pula penyebutannya menjadi Dinas Pelayanan Pajak Daerah Tingkat II Malang. Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Pelayanan Pajak Daerah mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan perundangan antara lain :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang susunan organisasi Dispenda Malang.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996. (Perubahan Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klasifikasinya menjadi tipe A).

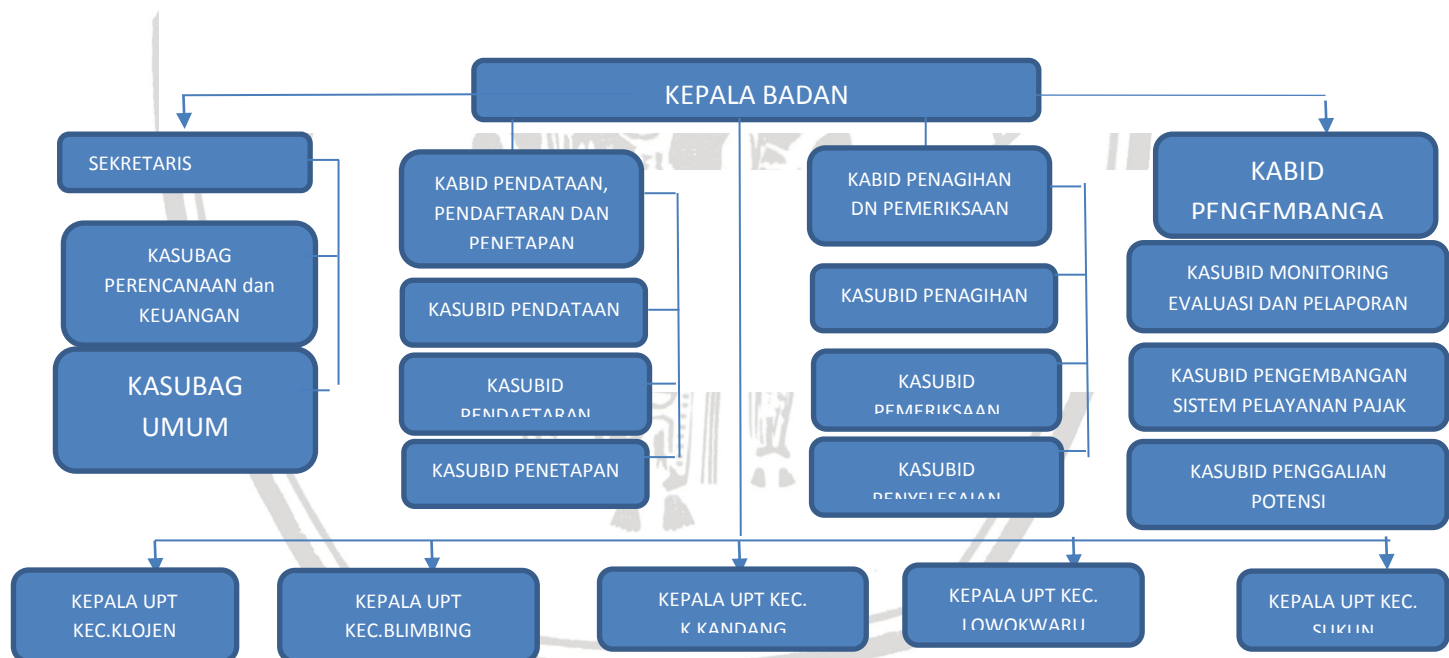
Sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pelayanan Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.<sup>1</sup> Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

---

<sup>1</sup>Website Resmi BPPD Kota Malang, <http://bppd.malangkota.go.id/profil/selayang-pandang> (diakses pada tanggal 07 Desember 2018)

Daerah yang didalamnya mencakup amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka Pemerintah Kota Malang.

Adanya perubahan dilakukan pula penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Dinas Pelayanan Pajak Daerah tersusun akan bidang-bidang atau lebih dikenal dengan struktur organisasi, sebagai berikut :



## 1. Struktur Organisasi BPPD Kota Malang Tahun 2017, terdiri dari :

### a. Kepala Badan

Kepala badan menaungi dari bidang-bidang yang ada di BPPD Kota Malang dimana dipimpin oleh Ir. H Ade Herawanto, MT. kepala



badan menaungi bidang-bidang yang dikategorikan menjadi 4, diantaranya :

- 1) Bagian pertama terdapat Sekretaris ( Mochamad Toriq, S.sos, M.TP) yang menaungi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (DR. dian Kuntari, S.STP, Msi), dan Kepala Sub Bagian Umum (Surya Bettasari, SE, MM)
- 2) Bagian kedua terdapat Kepala Bidang Pendataan, Pensus daftaran, dan Penetapan (Tedy Sujadi S, ST., M.Eng.Sc) yang menaungi Kepala Sub Bidang Pendataan (Ni Luh Eka Pujiastuti, SE, MM), Kepala Sub Bagian Pendaftaran (Nanang Sweistinura, S.AB), dan Kepala Sub Bagian Penetapan (Dra. Wiwik Yosoniati).
- 3) Bagian ketiga terdapat Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan (Dwi Cahyo, S.sos., MM) yang menaungi Kepala Sub Bagian Penagihan (Luluk Khafifah, SE), Kepala Sub Bagian Pemeriksaan (Solikin, S.sos), Kepala Sub Bidang Penyelesaian (Fauzan Indra S. S.TP., M.si)
- 4) Bagian keempat terdapat Kepala Bidang Pengembangan Potensi (Dra. Khumakyah, MM) yang menaungi Kepala Sub Bidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Dra. Laili Elisa, Msi), Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak (Toto Subaktio), Kepala Sub Bidang Penggalan Potensi (Didit Edy S, SE, MM)
- 5) Selain itu Kepala Badan juga membawahi Kepala UPT KECamatan Klojen (Chairul Adecha, ST), Kepala UPT Kecamatan Blimbing

(R.M. Ali Nuryadi, SH), Kepala Upt Kecamatan Lowokwaru (Lukman Hidayat, ST), dan Kepala UPT Kecamatan Sukun (Ir. Yusita Pusparini. M.Sc)

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pelayanan Pajak Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah. Dinas Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :<sup>2</sup>

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
- 2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 3) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 4) Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 5) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 6) Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 7) Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

---

<sup>2</sup>Website Resmi BPPD Kota Malang, <http://bppd.malangkota.go.id/profil/selayang-pandang> (diakses pada tanggal 07 Desember 2018)

- 8) Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- 9) Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- 10) Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- 11) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya.
- 12) Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- 13) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 14) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 16) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 17) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- 18) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
- 19) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 20) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 21) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 22) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
- 23) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- 24) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 25) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- 26) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 27) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.



**B. Bagaimana Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang**

Dalam perpajakan keterlambatan pembayaran pajak sangat mungkin terjadi di kalangan para penunggak pajak. Keterlambatan ini bahkan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Untuk itu tax amnesty dilaksanakan untuk menuntaskan keterlambatan-keterlambatan yang terjadi terutama dalam Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam wilayah Kota Malang, pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Walikota Malang dengan Nomor 7 Tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak Bumi Bangunan Perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di Kota Malang. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada Pasal 4 dimana yang berbunyi :

“sasaran Penghapusan sanksi administrasi merupakan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan PBB Perkotaan masa pajak sampai dengan tahun 2012”

Pasal 4 (empat) Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 ini menjelaskan mengenai sasaran atau subjek dari siapa saja yang mendapatkan penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini penulis berpikiran mengenai efektif atau tidaknya subjek dalam penghapusan sanksi administrasi pada penunggak pajak bumi dan bangunan perkotaan yang ada di Malang sampai dengan tahun 2012. Untuk itu dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori yang berasal dari Lawrence



Friedman dimana ia membagi suatu hukum dapat dikatakan efektif menjadi 4, diantaranya :

1. Struktur Hukum "*Legal Structure*"

Efektif atau tidaknya sebuah hukum dapat ditinjau dari susunan atau struktur dari hukum. Hukum haruslah memuat tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketidakpastian atau ketidaksesuaian antara suatu hukum atau norma dengan suatu pelaksanaan menjadi titik acuan apakah hukum itu sudah efektif atau dalam ilmu hukum dikenal dengan "*das sein*" dan "*das sollen*". *Das Sein* merupakan suatu susunan norma dimana bertujuan untuk dipatuhi. Sedangkan *das sollen* yakni pelaksanaan atau berlakunya norma tersebut dalam masyarakat.

2. Substansi Hukum "*Legal Substance*"

Efektifitas mencakup suatu penegakan hukumnya bagi penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari lembaga yang memiliki tanggung jawab dibidangnya.

3. Budaya Hukum "*Legal Culture*"

Budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana bertujuan untuk menilai suatu huku tersebut dengan suatu hukum yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan masyarakat mengenai hukum.

Teori efektifitas juga dikembangkan oleh Soejono Soekamto yang mana memperkuat teori efektifitas dari Lawrence dan yang akan

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dimana teori ini memandang hukum menjadi 5 (Lima) faktor, yakni: <sup>3</sup>

### 1. Faktor hukum

Soerjono Soekamto memandang suatu keefektifitas dari sebuah hukum dapat ditinjau berdasarkan suatu hukumnya yang berlaku, dimana dalam hukum tersebut memuat mengenai tujuan hukum baik bagi Negara dan warga negaranya, dimana dalam suatu hukum tidak diperbolehkan penghilangan suatu keadilan maupun kewajiban. Suatu hukum yang pasti merupakan salah satu tolak ukur suatu keefektifitas. Tidak terkecuali mengenai kemanfaatan hukum, dimana hukum merupakan suatu aturan yang berlaku serta penerapannya harus mempunyai kemanfaatan untuk masyarakat. Pajak wajib dibayar oleh wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengertian dari Wajib pajak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni :

“wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

---

<sup>3</sup> Ishaq, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**(cetakan ketiga), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 194

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Macam-macam pajak yang diatur dalam undang-undang, dalam penelitian ini meneliti mengenai pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pengertian dari bumi dan bangunan adalah :

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

Yang menjadi objek PBB adalah Bumi dan/atau bangunan, tetapi terdapat beberapa kualifikasi objek pajak yang tidak dikenakan pajak, diataranya:<sup>4</sup>

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang ditentukan oleh menteri keuangan

---

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Lembaran Negara Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312

Tarif pajak yang ditentukan adalah 0.5% (lima persepuluh persen) dan harus dikenakan untuk wajib pajak.

Dengan berlangsungnya waktu telah terjadi banyak penunggakan atau keterlambatan oleh wajib pajak. Setiap keterlambatan terdapat sanksi yang harus diterima oleh wajib pajak terdapat dalam pasal 11 ayat (3), yakni :

“Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan”.

Dikarenakan adanya pasal tersebut para wajib pajak enggan untuk mengurus atau membayar pajak mereka. Akhirnya muncullah program *Sunset Policy* atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012. Dengan adanya penghapusan sanksi administrasi ini diharapkan para penunggak pajak dapat membayar pajak sesuai tunggakan yang diterima. Untuk mendukung penghapusan sanksi pajak ini pemerintah Kota Malang mengeluarkan pengaturan walikota Nomor 7 Tahun 2016. Dalam penelitian ini meneliti mengenai pasal 4 Peraturan Walikota nomor 7 Tahun 2016 yakni mengenai sasaran dari peraturan walikota malang ini.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud oleh Soedjono Soekanto adalah suatu lembaga yang menaungi dimana lembaga tersebut memiliki tugas dalam pelaksanaan suatu hukum yang dalam penelitian ini penegak hukum yakni karyawan kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dimana merupakan suatu lembaga pemerintah yang bertugas dalam pelaksanaan suatu hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan yakni Bapak Dwi Cahyo, S.sos., MM. penegak hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah anggota Bidang Penagihan, Bidang Pemeriksaan, dan bidang penyelesaian, serta para anggota yang terlibat seperti petugas pelayanan loket, dan petugas lain dalam Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Dalam pelaksanaannya penegak hukum selaku petugas yang berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi telah melakukan tugasnya dengan baik, diantaranya:<sup>5</sup>

- a. Membentuk SPPT
- b. Launching SPPT lebih awal
- c. Blusukan bersama walikota yang turun ke masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang pajak atau sosialisasi serta melakukan pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Dwi Cahyo, S.sos., MM.selaku Ketua Bidang Penagihan dan pemeriksaan Dinas Pelayanan Pajak Daerah, pada tanggal 5 Januari 2018 di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.





- d. Petugas dalam Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah juga telah siap untuk membantu masyarakat membayarkan tunggakan pajaknya.

Cara yang digunakan oleh petugas untuk melakukan pemberitahuan kepada para wajib pajak yang menunggak yakni :<sup>6</sup>

1. Melakukan pemberitahuan secara resmi selama 3 (tiga) kali
2. Jika pemberitahuan masih belum ada tindakan maka, dilakukan penempelan stiker pada bangunan dengan harapan pemberitahuan kepada wajib pajak (bangunan) dan dilakukan pematokan pada tanah

*Sunset Policy* atau penghapusan sanksi administrasi ini telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di Kota Malang. Pertama dilakukan pada bulan Agustus tahun 2016 bertepatan dengan hari kemerdekaan dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Kedua dilakukan pada tahun 2017 bertepatan dengan hari jadi Kota Malang.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Disamping hukum dan penegak hukum juga memperhatikan dari faktor sarana dan prasarana atau fasilitas untuk menunjang suatu hukum menjapai tujuan. Terdapat cara untuk meningkatkan suatu sarana, seperti :

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Dwi Cahyo, S.sos., MM.selaku Ketua Bidang Penagihan dan pemeriksaan Dinas Pelayanan Pajak Daerah, pada tanggal 5 Januari 2018 di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

- a. Jika sarana tidak ada maka dapat memberikan sarana;
  - b. Jika sarana yang telah disediakan mengalami kerusakan maka akan dilakukan suatu perbaikan ;
  - c. Jika sarana telah ada namun memiliki kekurangan maka akan ditambahkan suatu sarana yang menunjang.
- Sebagai contoh kepolisian sebagai penegak hukum memerlukan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas.

Sarana dan prasarana dalam penelitian ini terdapat dalam Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Sarana yang digunakan :<sup>7</sup>

1. Database yang di kelola oleh petugas untuk memudahkan masyarakat untuk membayar dengan hanya membawa formulir, permohonan, kartu tanda penduduk, SPBB dan jangka waktu tunggakan pertahun.
2. Melakukan pelayanan di loket pembayaran pajak dengan diberikan dispensasi-dispensasi yang meringankan bagi penunggak pajak
3. Melakukan pelayanan lapangan menggunakan mobil khusus pembayaran pajak dimana hal ini dilakukan dengan mendatangi langsung kepada masyarakat

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Dwi Cahyo, S.sos., MM.selaku Ketua Bidang Penagihan dan pemeriksaan Dinas Pelayanan Pajak Daerah, pada tanggal 5 Januari 2018 di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

4. Melakukan kerjasama dengan media cetak elektronik baik melalui website, televisi, radio dan serta media cetak untuk melakukan sosialisasi mengenai *Sunset Policy*

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang memiliki hukum yang dipercaya sendiri yang menekan perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana hukum tersebut mengatur pola tingkah laku masyarakat demi tercapai suatu kedamaian, kerukunan, rasa saling tolong menolong dan peduli akan sesama. Dalam faktor masyarakat sebagai salah satu faktor penunjang dalam terciptanya suatu keefektifitasan hukum dinilai dari bagaimana masyarakat menilai hukum.

Dalam penelitian ini faktor masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dilakukannya penghapusan sanksi administrasi ini. Peran masyarakat sebagai subjek dari wajib pajak sangat besar. Dari dilakukannya program ini selama 2 (dua) kali antusias masyarakat sangat baik. Tetapi dalam hal kesadaran masih kurang dibuktikan dengan masih adanya wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajaknya.<sup>8</sup> Salah satu wajib pajak mengatakan bahwa keterlambatannya membayar karena lupa untuk membayar selama beberapa tahun dan untuk membayarkan pajaknya ia merasa keberatan dalam hal denda yang dibebankan

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Dwi Cahyo, S.sos., MM.selaku Ketua Bidang Penagihan dan pemeriksaan Dinas Pelayanan Pajak Daerah, pada tanggal 5 Januari 2018 di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

kepadanya, dengan adanya program ini meringankan wajib pajak dengan tidak membayar denda keterlambatan.<sup>9</sup>

## 5. Faktor Budaya

Dalam faktor ini memandang bahwa suatu budaya hukum yang pada dasarnya berlandaskan pada suatu nilai-nilai yang ada dalam sebuah hukum. Sebuah kebiasaan aturan yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Sebuah hukum harus berjalan dengan seiringan antara hukum positif dan budaya dalam masyarakat. Budaya hukum yang terjadi dengan menunda kesempatan menjadi penghalang bagi petugas untuk mensukseskan *Sunset Policy* ini. Seharusnya masyarakat lebih berpartisipasi karena program ini dibuat untuk memperingan masyarakat terutama wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya agar tidak terlalu membebani wajib pajak dengan denda keterlambatan.

### C. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dari pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang

#### 1. Hambatan

Realita yang terjadi pada penegakan pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak HD (inisial) selaku wajib pajak terutang, pada tanggal 5 Januari 2018 di Kantor Pendapatan Daerah Kota Malang

administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang terkait untuk mencapai tujuan pelaksanaan peraturan daerah tersebut dari pihak Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang terdapat hambatan yang dialami.

Hambatan yang dialami oleh Dinas Pendapatan Kota Malang adalah adanya ketidaksuaian data administrasi. Data administrasi wajib pajak yang tidak sesuai membuat wajib pajak enggan untuk melakukan pembayaran sanksi administrasi. Kesalahan penulisan data pribadi dan kesalahan penulisan asset yang dimiliki merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan program ini.

## 2. Solusi

Suatu pendapat untuk menyelesaikan masalah hambatan yang dialami oleh Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Hal ini berisi suatu pernyataan mengenai solusi atas hambatan penegakan pasal 4 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang.

Solusi dari hambatan tersebut yakni :<sup>10</sup>

- a. Wajib pajak diharapkan untuk memberikan pembaruan data apabila ada kesalahan administrasi yang

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Fauzan Indra S. S.TP., M.si selaku Kepala Sub Bidang Penyelesaian Dinas Pelayanan Pajak Daerah, pada tanggal 5 Januari 2018 di Kantor Pendapatan Daerah Kota Malang



berhubungan dengan data pribadi ataupun data asset yang dimiliki.

- b. Petugas administrasi lebih teliti dalam pengisian berkas administrasi.
- c. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi apabila terdapat kesalahan data administrasi terhadap objek pajak ataupun objek pajak.

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Pasal 4 Peraturan Walikota Malang Efektif dan mampu mengurai tunggakan pajak, dengan bukti meningkatnya jumlah pembayaran pajak atau wajib pajak sesuai dengan Pasal 4. Hal ini dibuktikan dengan hasil pelaksanaan Program *Sunset Policy* Kota Malang Tahun 2016 dan Tahun 2017.

NO	URAIAN	JUMLAH NOP TERBAYAR	JUMLAH PEMBAYARAN
1	Program Sunset Policy Tahap I tahun (2016) Dalam Rangka Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71	1.213	Rp. 1.591.563.409,-
2	Program Sunset Policy Tahap II tahun (2017) Dalam Rangka Ulang Tahun Kota Malang ke 103	539	Rp. 587.254.343,-

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

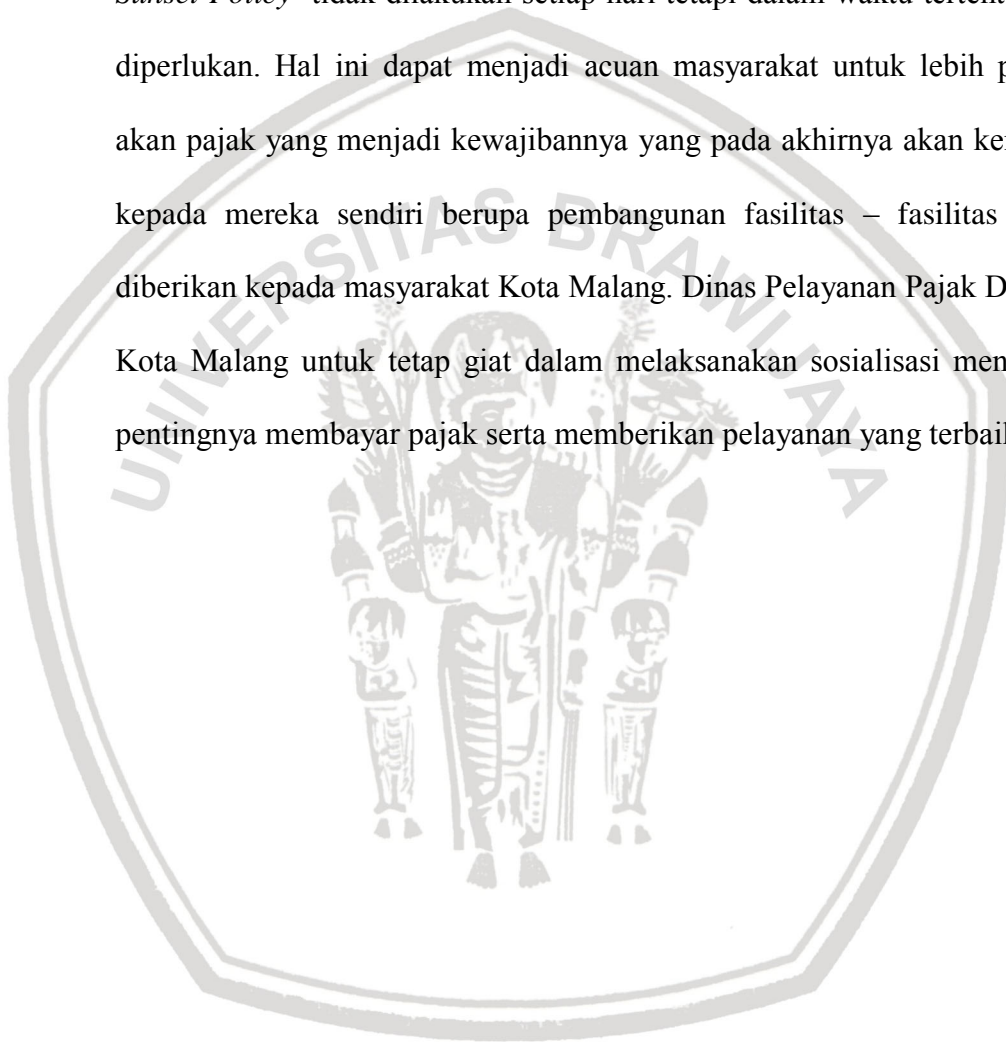
Melihat dari hasil penelitian diatas, penulis mendapatkan dua kesimpulan, yaitu :

Pertama, bahwa pasal 4 telah efektif dengan bukti tercapainya target yang diinginkan pemerintah Kota Malang. Kebijakan ini juga telah mampu mengurai tunggakan pajak yang dilimpahkan oleh KPP Kabupaten Malang kepada Kota Malang berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB P2 dan Aset Sitaan dari KPP Malang Utara dan KPP Malang Selatan kepada Pemerintah Kota Malang (No: BA-11/WPJ.12/KP.01/2013 dan No: BA-7/WPJ12/KP-14/2013) tanggal 30 januari 2013. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perolehan dari pajak bumi dan bangunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) dan serta peran aktif masyarakat atas program ini.

Kedua , Kesalahan data administrasi merupakan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program ini, namun hal ini tidak menghalangi antusiasme masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program *sunset policy* yang diadakan pemerintah Kota Malang. Hal ini juga dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban sanksi administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Peran aktif wajib pajak dengan pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan program *sunset policy*, memberikan dampak positif yaitu suksesnya program ini dan tercapainya target pemerintah Kota Malang dalam mengurai tunggakan pajak.

## B. Saran

Diharapkan wajib pajak untuk berperan aktif dalam menginformasikan apabila ada kesalahan data administrasi atas pembaruan aset dan data pribadi apabila ada ketidaksesuaian antara berkas administrasi pemerintah dengan berkas administrasi wajib pajak. Hal ini dikarenakan program *Sunset Policy* tidak dilakukan setiap hari tetapi dalam waktu tertentu dan diperlukan. Hal ini dapat menjadi acuan masyarakat untuk lebih peduli akan pajak yang menjadi kewajibannya yang pada akhirnya akan kembali kepada mereka sendiri berupa pembangunan fasilitas – fasilitas yang diberikan kepada masyarakat Kota Malang. Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk tetap giat dalam melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak serta memberikan pelayanan yang terbaik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Abidin Said Zainal, **Kebijakan Publik**, Penerbit Pancur Siwah, Jakarta, 2004.

Amiruddin dan Asikin Zainal H., **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, **Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Irfan Islamy, **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Koryati Nyimas Dwi. DKK, **Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah**, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004.

Malayu Hasibun, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, STIE YKPN, Yogyakarta, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005

PJA. Adriana dalam Santoso Brotodiharjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, PT. Eresco, Bandung, 1991.

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soerjono soekanto, **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perbuatan Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2010

Soerjono soekanto, **Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah sosial**, Alumni, Bandung, 1982.

Widodo Joko, **Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja**, Bayumedia Publishing, 2005.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Perubahan Keempat.*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak* , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899.

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan* , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak* , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899.

*Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan*



*perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 di kota Malang*, Berita daerah Kota Malang 2016 Nomor 7.

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan,,*

### C. Sumber Website

Direktorat Jendral Pajak, 2012, **Selayang Pandang,**

<http://www.pajak.go.id/content/selayang-pandang>

[http://suryamalang.tribunnews.com/2016/07/28/piutang-pbb-lewat-kkp-senilai-rp-](http://suryamalang.tribunnews.com/2016/07/28/piutang-pbb-lewat-kkp-senilai-rp-110-m-dispenda-kota-malang-gelar-penghapusan-denda-agustus)

[110-m-dispenda-kota-malang-gelar-penghapusan-denda-agustus](http://suryamalang.tribunnews.com/2016/07/28/piutang-pbb-lewat-kkp-senilai-rp-110-m-dispenda-kota-malang-gelar-penghapusan-denda-agustus)

[https://malang.merdeka.com/kabar-malang/pekan-ini-terakhir-pemutihan-denda-](https://malang.merdeka.com/kabar-malang/pekan-ini-terakhir-pemutihan-denda-pbb-perkotaan-di-kota-malang-1704112.html)

[pbb-perkotaan-di-kota-malang-1704112.html](https://malang.merdeka.com/kabar-malang/pekan-ini-terakhir-pemutihan-denda-pbb-perkotaan-di-kota-malang-1704112.html)

